



LAPORAN KINERJA TA 2023

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya Biro Perencanaan dan Keuangan dapat melaksanakan dan merampungkan seluruh tugas dan fungsi pada tahun 2022 dengan baik sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Laporan Kinerja Biro disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pelaksanaan kegiatan pada Layanan Perencanaan, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan. Laporan Kinerja (LKj) juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan koordinasi dan kinerja yang lebih baik di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 31 Desember 2023
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

#

Latif Maulana Razak

IKHTISAR LAPORAN

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas”. Sasaran tersebut diukur dari indikator kinerja yaitu indeks keberhasilan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target nilai indeks sebesar 3,07 (skala 4). Realisasi yang dicapai pada triwulan keempat di tahun 2023 yaitu **3,64** dengan persentase capaian sebesar **118,56%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai aspek Implementasi Biro Perencanaan dan Keuangan (33,3%) dengan nilai 87,64;
2. Nilai Aspek Manfaat Biro Perencanaan dan Keuangan (66,7%) dengan nilai 92,79

Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun 5 (lima) dokumen laporan triwulan/tahunan sesuai dengan target perjanjian kinerja, yang terdiri atas 5 dokumen perencanaan dan penganggaran, 5 dokumen pemantauan dan evaluasi, serta 32 dokumen manajemen keuangan.

Kinerja Keuangan dari alokasi anggaran sebesar Rp2.346.907.000 dengan realisasi **Rp2.311.301.295 (98,48%)**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
IKHTISAR LAPORAN.....	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	6
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	7
BAB II RENCANA KINERJA.....	8
A. Penetapan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
BAB III PENUTUP	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
A. Kendala.....	Error! Bookmark not defined.
B. Solusi.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan kepada Pimpinan Lembaga setiap tahun menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada atasan masing-masing. Penyusunan LKj merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKj, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi.

SAKIP juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik penyimpangan. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, menjadi komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan mendukung reformasi

birokrasi di lingkungan Ombudsman RI termasuk perubahan dan peningkatan kualitas di bidang perencanaan dan keuangan.

B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Ombudsman Republik Indonesia dipercayakan melakukan pengawasan terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah. Dalam hal mendukung tugas tersebut pasal 2 Pasal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan, Sekretariat Jenderal terdiri atas 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Inspektorat.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Bab II bagian 1 Pasal 5 dan 6 menyebutkan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi, dan pelaporan.
- 2) Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan
 - d. Pelaksanaan administrasi Biro.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro setingkat Eselon II.a yang membawahi satu unit eselon IV dan kelompok jabatan fungsional Bidang Perencanaan dan fungsional Bidang Perbendaharaan dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

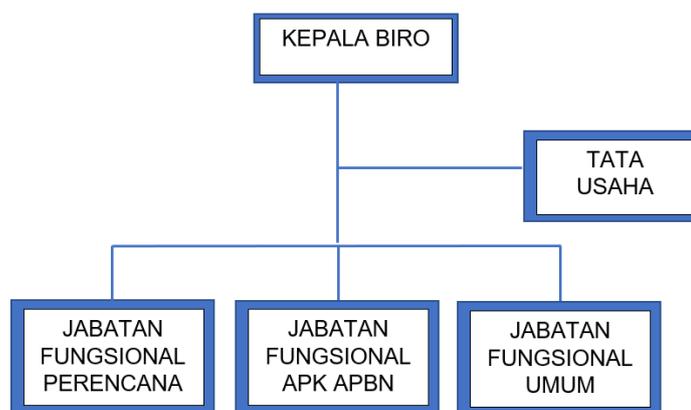
1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Biro Perencanaan dan Keuangan di dukung sumber daya manusia sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdiri dari:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Kepala Biro | : 1 orang |
| 2. Kepala Subbagian | : 1 orang |
| 3. Fungsional Tertentu | : 30 orang |
| 4. Fungsional Umum | : 49 orang |
| 5. Tenaga Pendukung | : 2 orang |

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Penetapan Kinerja

Program dan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri tiga Layanan Kegiatan, yakni Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, serta Layanan Manajemen Keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	3,07	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Triwulan, dan Tahunan	6	

Dalam perjanjian kinerja tersebut, Perencanaan dan Keuangan memiliki dua indikator kinerja, yakni indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target skala 3,07 dari indeks 4, serta Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan dengan target 6 Dokumen.

1. Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Terdiri dari Aspek Implementasi (33,3%) dan Aspek Manfaat (66,7%).

Berikut rincian aspek implementasi dan aspek manfaat:

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Aspek Implementasi					
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5	Dokumen	5	100%	Dokumen Revisi RKA Tahun 2023 (April) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (April) RKA Tahun 2024 (November) Rencana Kerja Tahun 2024 (November) Revisi Rencana Kerja Tahun 2023 (Desember)
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Laporan	5	100%	Laporan Tahunan 2022, Laporan Kinerja 2022, Laporan Triwulan I, II, III Tahun 2023
Layanan Manajemen Keuangan	32	Dokumen	32	100%	12 Dokumen Perbendaharaan, 12 Dokumen Kegiatan Pengelolaan Keuangan Perwakilan, dan 1 Laporan Keuangan TA. 2022 Unaudited 1 Laporan Keuangan TA. 2022 Audited 1 Laporan Keuangan Semester I TA 2023 1 Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 3 Laporan Pengelolaan Dokumentasi Keuangan Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023

Indikator	Target	Bobot	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Aspek Manfaat					
Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA KL	90	20%	97,15	107,94%	Data Per 15 Januari 2024
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96	20%	92,42	94,78%	Nilai IKPA Tahun 2023
Nilai SAKIP	75	10%	73,75	98,33%	Nilai SAKIP Biro Renkeu Tahun 2023
Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan	3 (Skala 4)	10%	3	100%	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan Tahun 2023
Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Perencanaan dan Keuangan	B	10%	A	120%	Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Renkeu Tahun 2023
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Renkeu	100%	10%	100%	100%	Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebanyak 5 temuan dan telah ditindaklanjuti semua, sedangkan atas Laporan Keuangan Tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak ada temuan
Nilai Pengelolaan Arsip Biro Renkeu	74,46 (Skala 100)	10%	78,56	100%	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal atas Biro Perencanaan Tahun 2023
Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya	75%	5%	75%	100%	Telah Dilakukan Coaching/ Mentoring/

melalui Coaching/ Mentoring/ Counseling (CMC)					Counseling (CMC) di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2023 dan dihadiri oleh 75% Insan Biro Renkeu
Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan dan Saran Penjaminan Mutu	100%	5%	100%	100%	Tidak ada temuan aduan Biro Renkeu di Tahun 2023

2. Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/Tahunan

Jumlah dokumen terdiri dari laporan triwulan I, II, dan III Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023, laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022, serta laporan tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022.

Perjanjian kinerja ini kemudian akan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Realisasi perjanjian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,07
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRO/RO	ANGGARAN
KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 607.013.858,00
RO1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 92.397.615,00
RO2 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 204.022.564,00
RO3 : Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 310.593.679,00
Jumlah	Rp. 607.013.858,00

Jakarta, Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

PLT. KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

ttd

ttd

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

Indahwati
NIP. 197011162003122001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,07
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRO/RO	Anggaran
KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 397.644.268,00
RO1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 175.758.746,00
RO2 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 156.445.522,00
RO3 : Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 65.440.000,00
Jumlah	Rp. 397.644.268,00

Jakarta, Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

PLT. KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

ttd

ttd

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

Noerman Adi Santoso
NIP. 197712262005011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,07
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRO/RO	Anggaran
KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 922.248.874,00
RO1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 466.652.639,00
RO2 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 197.608.914,00
RO3 : Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 257.987.321,00
Jumlah	Rp. 922.248.874,00

Jakarta, September 2023

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

ttd

ttd

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,07
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRO/RO	Anggaran
KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 922.248.874,00
RO1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 466.652.639,00
RO2 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 197.608.914,00
RO3 : Layanan Manejemen Keuangan	Rp. 257.987.321,00
Jumlah	Rp. 922.248.874,00

Jakarta, Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

ttd

ttd

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Kinerja

Program dan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri 3 Layanan Kegiatan, yakni Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, serta Layanan Manajemen Keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	3,07 (Skala 4)	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	6	

Dalam perjanjian kinerja tersebut, Biro Perencanaan memiliki 2 indikator kinerja, yakni indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target 3,07 dari indeks skala 4 dan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan dengan target 6 Dokumen.

1. Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Perhitungan Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan berdasar pada aspek implementasi dengan bobot 33,3% dan aspek manfaat dengan bobot 66,7%.

Nilai Aspek Implementasi

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Aspek Implementasi					
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5	Dokumen	5	100%	Dokumen Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 (April) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (April) Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 (November) Rencana Kerja Tahun 2024 (November) Revisi Rencana Kerja Tahun 2023 (Desember)
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Laporan	5	100%	Laporan Tahunan 2022, Laporan Kinerja 2022, Laporan Triwulan I, II, III Tahun 2023
Layanan Manajemen Keuangan	32	Dokumen	32	100%	12 Dokumen Perbendaharaan, 12 Dokumen Kegiatan Pengelolaan Keuangan Perwakilan, dan 1 Laporan Keuangan TA. 2022 Unaudited 1 Laporan Keuangan TA. 2022 Audited 1 Laporan Keuangan Semester I TA 2023 1 Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023

					3 Laporan Pengelolaan Dokumentasi Keuangan Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023
--	--	--	--	--	---

Total nilai Aspek Implementasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 87,64.

Nilai Aspek Manfaat

Indikator	Target	Bobot	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Aspek Manfaat					
Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA KL	90	20%	84,65	94,05%	Data Realisasi 2023
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96	20%	92,42	94,78%	Nilai IKPA Tahun 2023
Nilai SAKIP	75	10%	73,75	98,33%	Nilai SAKIP Biro Renkeu Tahun 2023
Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan	3 (Skala 4)	10%	3	100%	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan Tahun 2023
Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Perencanaan dan Keuangan	B	10%	A	120%	Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Renkeu Tahun 2023
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Renkeu	100%	10%	100%	100%	Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebanyak 5 temuan dan telah ditindaklanjuti semua, sedangkan atas Laporan Keuangan Tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak ada temuan

Nilai Pengelolaan Arsip Biro Renkeu	74,46 (Skala 100)	10%	78,56	100%	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal atas Biro Perencanaan Tahun 2023
Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui Coaching/ Mentoring/ Counseling (CMC)	75%	5%	75%	100%	Telah Dilakukan Coaching/ Mentoring/ Counseling (CMC) di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2023 dan dihadiri oleh 75% Insan Biro Renkeu
Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan dan Saran Penjaminan Mutu	100%	5%	100%	100%	Tidak ada temuan aduan Biro Renkeu di Tahun 2023

Total nilai aspek manfaat pada biro perencanaan dan keuangan adalah sebesar 90,29.

Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Bobot	Realisasi	Nilai <i>$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$</i>
Aspek Implementasi	33,3%	87,64	1,16
Aspek Manfaat	66,7%	92,38	2,48
Total Nilai Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan			3,64

Berdasarkan perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa total nilai Aspek Implementasi 87,64 dan total nilai Aspek Manfaat 92,38. Sehingga dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Kinerja Biro Perencanaan dengan memasukkan rumus:

$$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$$

Didapatkan nilai yang diambil dari Aspek Implementasi sebesar 1,16 dan Aspek Manfaat sebesar 2,48. Total Nilai Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 3,64 dari skala 4 atau sebesar 118,56% dari target 3,07 dengan indeks skala 4.

- b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan
- Pada Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan telah Menyusun 4 Dokumen Pelaporan, yakni Laporan Tahunan Biro Renkeu Tahun 2022, Laporan Kinerja Biro Renkeu Tahun 2022, Laporan Triwulan I, II dan III Biro Renkeu Tahun 2023.

B. Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran pada Biro Perencanaan dan Keuangan per Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp2.311.301.295 atau sama dengan 98,48% dengan rincian terlampir di bawah ini:

Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan TA. 2023

REALISASI S.D. TRIWULAN IV BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TA 2023		PAGU	REALISASI	%	SISA	
WA.4051	Perencanaan dan Keuangan	2.346.907.000	2.311.301.295	98,48	35.605.705	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.346.907.000	2.311.301.295	98,48	35.605.705	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.154.809.000	272.156.361	98,33	19.327.139	
051	Penyusunan Perencanaan	845.948.000	828.272.074	97,91	17.675.926	
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	845.984.000	828.272.074	97,91	17.675.925	
	521211	Belanja Bahan	26.393.000	25.440.000	94,93	15.562.500
	522131	Belanja Jasa Konsultan	360.000.000	353.897.000	98,30	6.103.000
	522151	Belanja Jasa Profesi	21.600.000	14.800.000	68,52	6.800.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.375.000	75.285.074	99,88	89.926
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	362.580.000	358.850.000	98,97	3.730.000

052	Penyusunan Penganggaran		308.861.000	307.209.787	99,47	1.651.213
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN		308.861.000	307.209.787	99,47	1.651.213
	521211	Belanja Bahan	12.409.000	12.278.500	98,95	130.500
	522151	Belanja Jasa Profesi	19.800.000	19.800.000	100	0
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.644.000	41.641.287	99,99	2.713
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	235.008.000	233.490.000	99,35	1.518.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		558.077.000	447.830.074	99,10	110.246.926
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		558.077.000	447.830.074	99,10	110.246.926
051.0A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		446.411.000	380.250.074	99,15	66.160.926
	522151	Belanja Jasa Profesi	7.000.000	6.400.000	91,43	600.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	204.120.000	188.098.494	98,77	2.514.677
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000	13.950.000	96,88	450.000
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	213.840.000	213.690.000	99,93	150.000
051.0B	Penyusunan Laporan Triwulan, Tahunan, dan Kinerja		111.666.000	67.580.000	98,88	44.086.000
	521211	Belanja Bahan	11.131.000	9.802.225	88,06	1.328.775
	522191	Belanja Jasa Lainnya	60.000.000	60.000.000	100	0
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.586.000	47.580.000	99,98	6.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		634.021.000	431.913.269	98,23	11.228.114
051	Pengelolaan Keuangan Pusat		211.341.000	209.520.473	99,41	1.820.527
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN		211.341.000	209.520.473	99,41	1.820.527
	521211	Belanja Bahan	10.371.000	10.330.473	99,61	40.527
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	3.600.000	100	0
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	197.370.000	195.590.000	99,10	1.780.000
052	Pengelolaan Keuangan Perwakilan		211.340.000	204.713.739	98,86	6.626.261

052.0A	Fasilitasi Keuangan Perwakilan		170.660.000	164.212.000	96,19	6.448.000
	521211	Belanja Bahan	2.120.000	2.100.000	99,06	20.000
	522151	Belanja Jasa Profesi	6.000.000	0	0	6.000.000
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	162.540.000	162.112.000	99,74	428.000
052.0B	Uji Petik Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Perwakilan		40.680.000	40.501.739	99,56	178.261
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.680.000	40.501.739	99,56	178.261
053	Akuntansi dan Pelaporan		211.340.000	208.557.674	98,68	2.782.326
053.0A	Pengelolaan Akuntansi		160.220.000	157.847.674	98,52	2.372.326
	521211	Belanja Bahan	19.040.000	18.897.600	99,25	142.400
	522191	Belanja Jasa Lainnya	10.300.000	10.300.000	100	0
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86.890.000	86.880.000	100	0
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.000.000	41.770.074	94,93	2.229.926
053.0B	Pelaporan dan Dokumentasi		51.120.000	50.710.000	99,20	410.000
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51.120.000	50.710.000	99,20	410.000

Tabel di atas menggambarkan penyerapan Biro Perencanaan dan Keuangan di Tahun 2023, dengan rincian:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan pagu Rp 1.154.809.000 terealisasi sebesar Rp 1.135.481.861 (98,33%);
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan pagu Rp 558.077.000 terealisasi sebesar Rp 553.027.548 (99,10%);
3. Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu Rp634.021.000 terealisasi sebesar Rp 622.791.886 (98,23%).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Realisasi Capaian PK Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 atas nilai aspek implementasi dengan bobot 33,3% terhadap Capaian Rincian Output, Nilai Efisiensi Unit Kerja, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran mendapatkan nilai 87,64

Untuk nilai aspek manfaat dengan bobot 66,7% terhadap Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA KL, Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai SAKIP, Nilai Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan mendapatkan nilai 92,79. Total penyerapan dari pagu anggaran Rp2.346.907.000 realisasi sebesar Rp2.311.301.295 (98,48%) dengan sisa anggaran Rp35.605.705.

Dokumen hasil kinerja capaian output selama tahun 2023: 5 dokumen Perencanaan dan Penganggaran terdiri dari Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023; Rencana Kerja Tahun 2024; Revisi RKA KL TA 2023; Revisi Rencana Kerja 2023; Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, 5 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yakni Laporan Tahunan Tahun 2022; Laporan Kinerja (LKj/LAKIP) Tahun 2022; Laporan Triwulan I Tahun 2023; Laporan Triwulan II Tahun 2023; Laporan Triwulan III Tahun 2023, dan 32 Manajemen Keuangan yang terdiri dari 12 Dokumen Keuangan Pusat; 12 Dokumen Keuangan Perwakilan; 8 Dokumen Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari 4 Laporan Keuangan Ombudsman RI (Unaudited, Audited, Semester I, dan Triwulan III); 4 Laporan Triwulan Pengelolaan Dokumentasi Arsip Keuangan.

LAMPIRAN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Nasional					
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	5)
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

